



Berkurang, DPSHP Yogya 300.355 Pemilih

UMBULHARJO (MERAPI) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) Pemilu 2019 sebanyak 300.355 pemilih. Jumlah pemilih itu berkurang dibandingkan dalam DPS yang telah ditetapkan sebelumnya 300.863 pemilih.

Menurut Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto, Minggu (22/7), salah satu penyebab jumlah pemilih itu berkurang karena koreksi atau pencoretan pemilih yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

"Syarat menjadi pemilih dalam Pemilu 2019 harus memiliki KTP elektronik, sehingga kalau ada di daftar pemilih ada terdata tapi belum memiliki KTP elektronik bisa kita coret," kata Wawan Budiyanto.

Dalam DPS yang ditetapkan pertengahan Juni 2018 lalu terdapat 6.000 calon pemilih belum memiliki e-KTP dan masuk dalam daftar A.C-KWK. Daftar pemilih itu lalu dikoordinasikan dengan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogyakarta untuk memastikan data pemilih tersebut telah merekam data e-KTP. KPU, lanjutnya, sudah berupaya mendata dulu pemilih yang belum masuk ke DPS. Tapi syarat formal menjadi pemilih yaitu e-KTP harus dipenuhi.

"Pendataan pemilih dulu bagian dari upaya agar tidak ada pemilih tercecer. Tapi syarat for-

mal harus dipenuhi yaitu kepemilikan KTP elektronik. Kalau yang bersangkutan sudah rekam data berarti sudah mempunyai e-KTP berarti bisa masuk DPSHP dan tidak dicoret dari DPSHP," terangnya.

DPSHP yang ditetapkan terdiri atas 143.925 pemilih laki-laki dan 156.430 pemilih. Pemilih paling banyak di Kecamatan Umbulharjo yakni 47.860 pemilih. Sedangkan jumlah pemilih paling sedikit di Kecamatan Pakualaman yaitu 8.268 pemilih. Namun jumlah pemilih itu masih dapat berubah karena akan disosialisasikan untuk mendapatkan masukan masyarakat kembali. DPSHP itu menjadi dasar untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Agustus 2018.

"DPS hasil perbaikan ini masih akan kami sampaikan ke masyarakat melalui PPS setempat sehingga masih bisa berubah karena sifatnya dinamis," imbuh Wawan.

Sebelumnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Sisruwadi menyebut sekitar 5.000 warga wajib KTP yang belum rekam data itu sekitar 1,7 persen dari total wajib KTP di Kota Yogyakarta. Meskipun persentasenya kecil, tapi Dindikcapil mendorong warga memiliki kesadaran untuk segera melakukan perekaman e-KTP. Apalagi pada Pemilu serentak 2019 hak pilih berdasarkan pada kepemilikan e-KTP. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			
3. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005